

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Fakhry., *et al.*, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Bakhri, Syaiful, 2020, *“Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan”*, UM Jakarta Press, Tangerang Selatan.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fendri, Azmi, 2023, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M, *et al.*, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni’matul, 2013, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2015, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Indrati S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kontras, 2005, *Menolak Impunitas: Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia*, Abacus, Jakarta.
- Kusriyah, Sri, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Lambelanova, Rossy, *et al.*, 2022, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jatinangor.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Megawati, 2024, *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Ridwan, H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudrajad, Achmad, 2022, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- Sujito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.
- _____, *et al.*, 2023, *Keistimewaan Yogyakarta antara Sabda Raja & Kuasa Negara*, Thafa Media, Bantul.
- Sumardjono, Maria S.W., 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wahyukismyo, Heru, 2008, *Merajut kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Dharmakaryadhika, Yogyakarta.
- Waisitiono, Sadu, *et al.*, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, CV. Fokusmedia, Bandung.

B. Antologi

- Rahmawan, Adrianto Budi, *et al.*, “Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan” dalam Richo Andi Wibowo (Ed), 2024, *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, RajawaliPers, Depok.
- Rizky Septiana Widyaningtyas, “Ragam Perbuatan Pemerintah” dalam Richo Andi Wibowo (Ed), 2024, *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, RajawaliPers, Depok.

C. Artikel Jurnal

- Ali, Moh., dan Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, Desember 2021.
- Assaad, Andi Istiqlal, "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 2, November 2017.
- Dardias, Bayu, "Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, Juni 2016.
- Fadilan, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Firdaus, Arief, *et al.*, "Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa Demokrasi berdasarkan Pancasila", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Halili, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Budaya Impunitas", *Jurnal Civics*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Hermana, M. Arafat, dan Arie Elcaputera, "Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Laksono, Fajar, *et al.*, "Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, 2011.
- Listiana, Novy, "Hak Imunitas Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19", *Badamai Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Lubis, Alfi Syahri, *et al.*, "Problematika Pemberian Otonomi Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang Hanya Berada pada Tingkat Provinsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024.
- Mathar, Ahmad, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Mathar, Ahmad, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Pawana, Sekhar Chandra, "Titah Raja Kasultanan Yogyakarta dalam Perspektif Teori Beslissingenleer Ter Haar", *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum*, Vol. 36, No. 1, Juni 2020.
- Putra, Anugrah Andara, Hasyim Asy'ari, dan Untung Sri Hardhanto, "Penerapan Hak Imunitas yang Dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi *Forum Privilegiatum*", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Rifayani, Sofie Dwi, *et al.*, "Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal of Politic and Government Studies*, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Rizani, Raisa, "Sabdatama dan Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Simandjuntak, Reynold, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
- Sinaga, Parbuntian, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Binamulia Hukum*, Vol.7, No. 1, 2018.
- Susanto, Sri Nur Hari, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.
- Tauda, Gunawan A., "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 4, November 2018.
- Vinuales, Jorge E., "Impunity: Elements for an Empirical Concept", *Minnesota Journal of Law & Inequality*, Vol. 25, No. 1, 2007.

D. Produk Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

E. Laporan Penelitian/Tugas Akhir

Janah, Miftachul, 2014, *Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Mandella, Cut Ayu Rosi, 2023, *Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Muhaimin, La Ode, 2018, *Pemberhentian Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Makalah

Kurniadi, Bayu Dardias, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Makalah*, Seminar di Lembaga Administrasi Negara, Jatinangor, 26 November 2012.

G. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. Internet

Agustina, Widiarsi, "8 Poin Sabdatama Raja Yogya",
<https://nasional.tempo.co/read/647700/8-poin-sabdatama-raja-yogya>,
diakses 24 September 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring", Hasil Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id), diakses 28 September 2024.

H., Yanuar, "Sultan HB X Ucapkan Sabda Tama, Keraton Yogya Tetap Kompak",
<https://www.liputan6.com/news/read/2187019/sultan-hb-x-ucapkan-sabda-tama-keraton-yogya-tetap-kompak?page=3>, diakses 8 Februari 2025.

Jatmiko, Bambang Priyo, "Pertama Kalinya, Sultan HB X Beri Amanat untuk Masyarakat DIY",
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13282203/pertama-kalinya-sultan-hb-x-beri-amanat-untuk-masyarakat-diy>, diakses 10 Maret 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan)"
<https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada 10 Januari 2025.

Kementerian Dalam Negeri, "Sejarah Kemendagri",
<https://bskdn.kemendagri.go.id/website/sejarah-kemendagri/>, diakses 1 Maret 2025.

Kusuma, Wijaya, "Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama", Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama Halaman all - Kompas.com, diakses 24 September 2024.

Margana, Sri, "Sabdatama Sultan HB X dan Suksesi Kekuasaan",
<https://www.medcom.id/pilar/kolom/ObzGPz0k-sabdatama-sultan-hb-x-dan-suksesi-kekuasaan>, diakses 8 Februari 2025.

Salmande, Ali, "NKRI dan Yogyakarta Terikat Perjanjian",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/nkri-dan-yogyakarta-terikat-perjanjian-lt4d6d4a01b4818/>, diakses 16 Januari 2025.

Tim Hukumonline, 5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/?page=2>, diakses 12 Februari 2025.